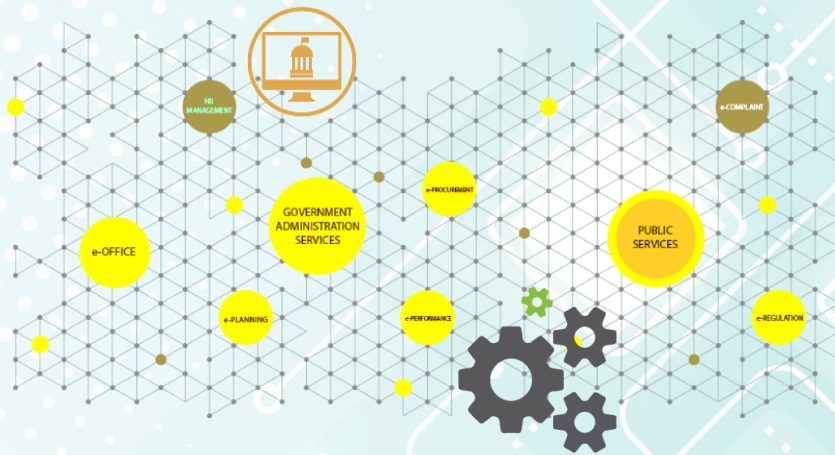




HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2018



**Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69
Jakarta Selatan 12190



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas karunia dan hidayahnya, kami dapat menyelesaikan serangkaian pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dengan capaian sebanyak 616 Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan hasil evaluasi SPBE ini dimaksudkan sebagai dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE secara nasional yang menghasilkan Indeks SPBE Nasional pada Tahun 2018. Indeks SPBE Nasional ini menjadi tolok ukur bagi Pemerintah dalam menyelaraskan program-program dan rencana pengembangan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan, kesinambungan, dan kualitas dalam layanan SPBE.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama dalam pelaksanaan evaluasi SPBE ini, semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Maret 2019
Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,

Rini Widyantini



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3. Sistematika Pelaporan	2
Metodologi Evaluasi SPBE	3
2.1. Tingkat Kematangan SPBE.....	3
2.2. Struktur Penilaian	4
2.3. Pelaksanaan Evaluasi SPBE.....	8
Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018.....	10
1.1. Indeks SPBE Nasional	10
1.2. Tabulasi Hasil Evaluasi SPBE 2018	14
Penutup	34
4.1. Permasalahan Umum.....	34
4.2. Rekomendasi	35
4.3. Tindak Lanjut Tahun 2019	35



Daftar Tabel

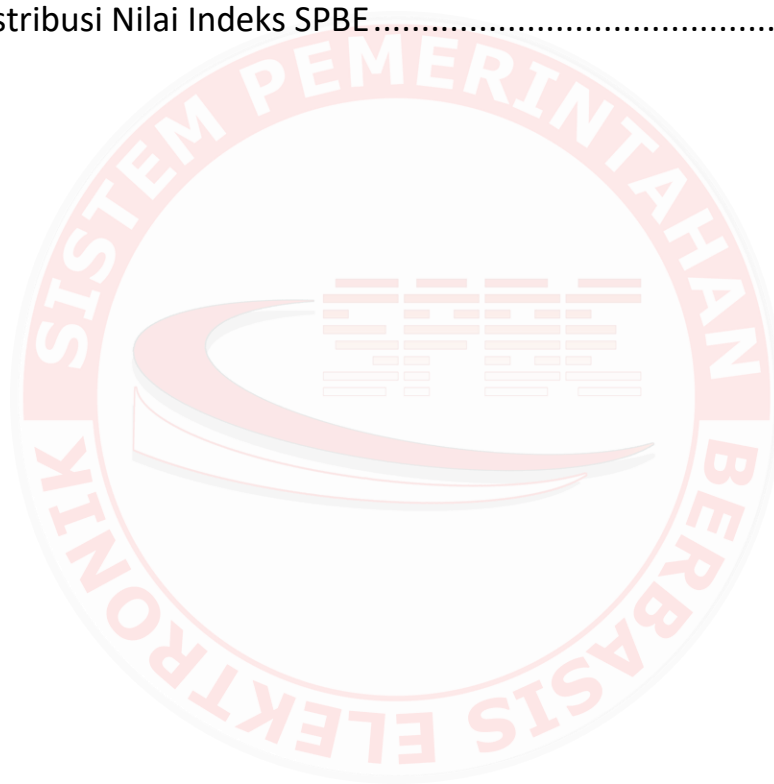
Tabel 1. Domain, Aspek, dan Indikator	4
Tabel 2. Tabel Pembobotan dan Predikat Indeks SPBE	7
Tabel 3. Hasil Evaluasi SPBE Kementerian	14
Tabel 4. Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) ...	15
Tabel 5. Hasil Evaluasi SPBE Alat Negara	16
Tabel 6. Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet	16
Tabel 7. Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara	17
Tabel 8. Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Penyiaran Publik	17
Tabel 9. Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Lembaga Non Struktural (LNS)	17
Tabel 10. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh	18
Tabel 11. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara	18
Tabel 12. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau	19
Tabel 13. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat.....	19
Tabel 14. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi	20
Tabel 15. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan	20
Tabel 16. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu.....	21
Tabel 17. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung.....	21
Tabel 18. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau.....	22
Tabel 19. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kep. Bangka Belitung	22
Tabel 20. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Banten	22
Tabel 21. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta.....	23
Tabel 22. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat	23
Tabel 23. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah	23
Tabel 24. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur	24
Tabel 25. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Yogyakarta.....	25
Tabel 26. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat	26
Tabel 27. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah	26
Tabel 28. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur	26
Tabel 29. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan.....	27
Tabel 30. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara.....	27
Tabel 31. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bali.....	28
Tabel 32. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat	28

Tabel 33. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur.....	28
Tabel 34. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara	29
Tabel 35. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo	29
Tabel 36. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat	30
Tabel 37. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah	30
Tabel 38. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan	30
Tabel 39. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara	31
Tabel 40. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku	31
Tabel 41. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara.....	32
Tabel 42. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat	32
Tabel 43. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua	32



Daftar Gambar

Gambar 1. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	6
Gambar 2. Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE	7
Gambar 3. Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi SPBE	8
Gambar 4. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2018	9
Gambar 5. Nilai Indeks Domain SPBE Nasional	10
Gambar 6. Indeks Aspek SPBE 2018	11
Gambar 7. Indeks Aspek SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	12
Gambar 8. Distribusi Nilai Indeks SPBE	13





PENDAHULUAN





Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemanfaatan teknologi informasi telah banyak diimplementasikan oleh sebagian besar Instansi Pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan layanannya, namun kendalanya bagi pembangunan tersebut adalah dalam penyelenggaraannya belum efektif, efisien, dan terpadu.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari evaluasi SPBE ini adalah untuk mengetahui dan memetakan hasil kinerja dari pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut dalam rangka memperoleh data dasar dengan keluaran (*output*) berupa indeks dan rekomendasi.

Manfaat (*outcome*) dari kegiatan evaluasi SPBE, antara lain :

1. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

1.3. Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan evaluasi SPBE Nasional ini diuraikan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, dasar hukum, cakupan dan tujuan serta manfaat dari pelaksanaan Evaluasi SPBE.

METODOLOGI EVALUASI SPBE

Mendeskripsikan metode dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi SPBE.

PELAKSANAAN EVALUASI SPBE

Menjelaskan tahapan evaluasi SPBE dan menguraikan pelaksanaannya.

HASIL DAN REKOMENDASI

Menerangkan capaian pelaksanaan Evaluasi SPBE dan Indeks SPBE Nasional.

PENUTUP

Menjelaskan permasalahan dalam penerapan SPBE, saran dan rekomendasi perbaikan serta tindak lanjut hasil evaluasi SPBE.

METODOLOGI EVALUASI SPBE





Metodologi Evaluasi SPBE

2.1. Tingkat Kematangan SPBE

Tingkat kematangan SPBE merupakan metodologi yang digunakan dalam mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Metode tingkat kematangan pada evaluasi SPBE dikembangkan berdasarkan model-model tingkat kematangan yang telah dipraktikkan secara luas, yaitu:

- a) CMM/CMMI (*Capability Maturity Model/CMM Integration*) yang dibangun oleh *Software Engineering Institute* (SEI) merupakan model yang mengukur tingkat kematangan proses pengembangan piranti lunak. Model ini menjadi dasar pengembangan berbagai model kematangan lain seperti tingkat kematangan tata kelola TIK pada COBIT (*Control Objectives for Information Technology*), arsitektur TIK (*Enterprise Architecture Maturity Model*), manajemen risiko (*Risk Maturity Model*), dan manajemen pengetahuan (*Maturity Model for Knowledge Mangement*).
- b) *E-Government Maturity Models* merupakan model tingkat kematangan yang mengukur evolusi SPBE dari aspek fungsionalitas dan kapabilitas teknis yang dikembangkan oleh banyak pihak antara lain Layne dan Lee (2001), Andersen dan Henriksen (2006), dan Kim dan Grant (2010), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada UN *eGovernment Survey* (2012).

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandarisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Setiap tingkat

(level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah.

2.2. Struktur Penilaian

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari satu atau beberapa indikator. Domain, aspek, dan indikator dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Domain, Aspek, dan Indikator

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi
Domain 1	Kebijakan SPBE
Aspek 1	Kebijakan Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Kebijakan Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 2	Kebijakan Inovasi proses bisnis terintegrasi
Indikator 3	Kebijakan Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 4	Kebijakan Anggaran dan Belanja TIK
Indikator 5	Kebijakan Pengoperasian Pusat Data
Indikator 6	Kebijakan Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 7	Kebijakan Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Aspek 2	Kebijakan Layanan SPBE
Indikator 8	Kebijakan Layanan Naskah Dinas
Indikator 9	Kebijakan Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 10	Kebijakan Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran
Indikator 11	Kebijakan Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 12	Kebijakan Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 13	Kebijakan Layanan Pengadaan
Indikator 14	Kebijakan Layanan Pengaduan Publik
Indikator 15	Kebijakan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 16	Kebijakan Layanan <i>Whistle Blowing System</i>
Indikator 17	Kebijakan Layanan publik Instansi Pemerintah

Domain/Aspek/ Indikator	Deskripsi
Domain 2	Tata Kelola SPBE
Aspek 3	Kelembagaan
Indikator 18	Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 19	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
Aspek 4	Strategi dan Perencanaan
Indikator 20	Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah
Indikator 21	Anggaran dan Belanja TIK
Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22	Pengoperasian Pusat Data
Indikator 23	Integrasi Sistem Aplikasi
Indikator 24	Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai
Domain 3	Layanan SPBE
Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 25	Layanan Naskah Dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Penganggaran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja
Indikator 31	Layanan Pengadaan
Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 33	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 34	Layanan <i>Whistle Blowing System</i>
Indikator 35-1	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1
Indikator 35-2	Layanan Publik Instansi Pemerintah 2
Indikator 35-3	Layanan Publik Instansi Pemerintah 3

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses SPBE

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi SPBE

Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Gambar 2.

1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

Gambar 2. Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE

Pembobotan dan Predikat Indeks SPBE

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. Tabel Pembobotan dan Predikat Indeks SPBE

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		17%			
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE		7%			
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE		10%			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		28%			
Aspek 3 - Kelembagaan		8%			
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan		8%			
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		12%			
Domain 3 - Layanan SPBE		55%			
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		33%			
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik		22%			

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Nilai indeks dihitung secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada indikator. Nilai indeks terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a) Nilai Indeks Aspek adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu.
- b) Nilai Indeks Domain adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu.
- c) Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan.

Seluruh predikat pada tabel diatas berlaku pada setiap tingkatan Indeks sehingga pengukuran pada setiap Aspek dan Domain juga dapat diukur indeksnya dan menjadi acuan untuk melihat secara detail yang menjadi kelemahan mendasar untuk ditingkatkan dan mendapatkan perhatian lebih oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.3. Pelaksanaan Evaluasi SPBE

Pelaksana kegiatan evaluasi SPBE terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi SPBE dan Tim Evaluasi Internal masing-masing Instansi Pemerintah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi SPBE, terdiri dari:
 - a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Universitas Indonesia;
 - c. Universitas Gadjah Mada;
 - d. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
 - e. Universitas Telkom;
 - f. Universitas Gunadarma.



Gambar 3. Tim Pelaksana Kegiatan Evaluasi SPBE

2. Tim Evaluasi Internal Instansi Pemerintah

Evaluator Internal Instansi Pemerintah merupakan unsur Pejabat/pegawai dari masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan ditetapkan dalam rangka melakukan evaluasi mandiri sebagai kegiatan pengumpulan data pelaksanaan evaluasi SPBE.



Gambar 4. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2018

Kegiatan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan berikut:

- Sosialisasi evaluasi SPBE kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret – 16 April 2018.
- Evaluasi mandiri dilaksanakan oleh masing-masing Tim Evaluator Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 26 Maret – 18 Mei 2018.
- Evaluasi Dokumen (*Desk Evaluation*) dilakukan oleh Evaluator Eksternal pada tanggal 15 Mei – 31 Mei 2018.
- Wawancara dilaksanakan pada tanggal 9 Juli – 10 Agustus 2018.
- Evaluasi SPBE pada Instansi Pemerintah (*Observasi Lapangan*) dilaksanakan pada 16 September – 22 November 2018.
- Pengolahan dan pelaporan hasil evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dilakukan pada bulan Desember 2018.



HASIL EVALUASI SPBE



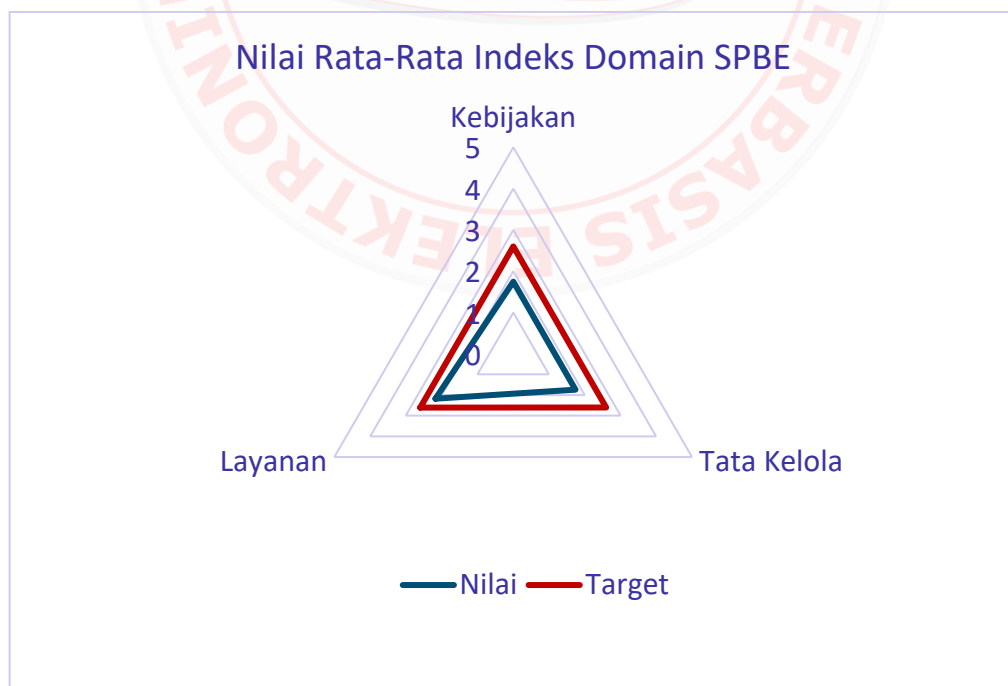


Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018

1.1. Indeks SPBE Nasional

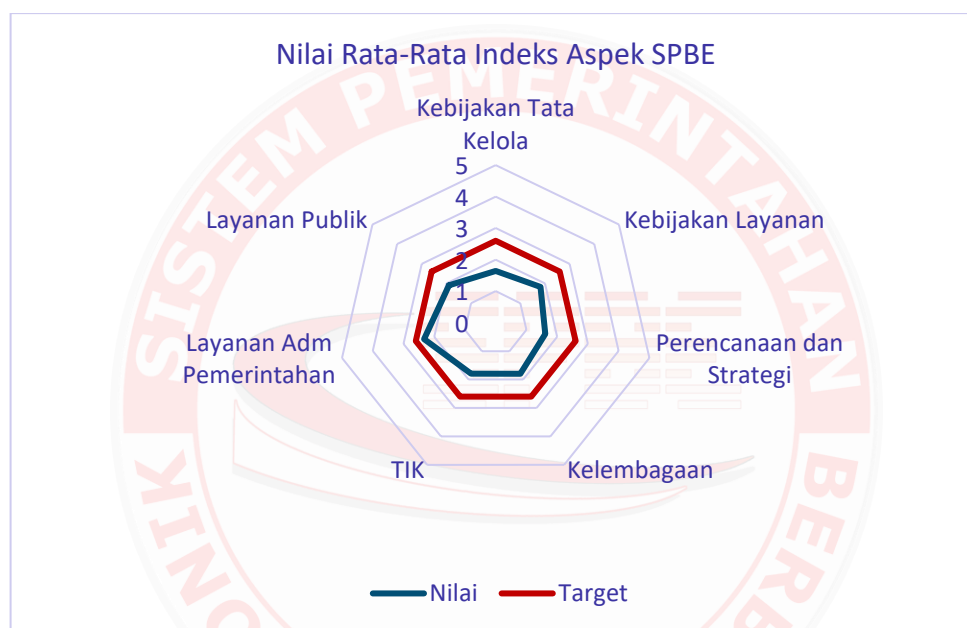
Evaluasi SPBE pada tahun 2018 dilaksanakan dengan capaian sebanyak 616 Instansi Pemerintah yang terdiri dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Polri. Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilaksanakan tersebut, menghasilkan nilai tingkat kematangan pada Domain dan Aspek, serta nilai Indeks SPBE Nasional.

Apabila dilihat berdasarkan cakupan yang lebih umum, yaitu Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, dan Domain Layanan, maka Domain Layanan mencapai indeks rata-rata tertinggi yaitu 2,17, dengan nilai indeks tertinggi sebesar 4,61. Sedangkan Domain Kebijakan dengan indeks rata-rata 1,75, dengan nilai tertinggi 4,06 dan pada Domain Tata Kelola dengan indeks rata-rata 1,74, dengan nilai tertinggi 4,71. Dapat terlihat pada diagram radar dibawah ini:



Gambar 5. Nilai Indeks Domain SPBE Nasional

Selanjutnya, apabila melihat diagram tingkat kematangan Aspek (Gambar 6), bahwa dari ke-7 (tujuh) aspek pada instrumen evaluasi SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintah mendekati kategori “Baik” dengan nilai tingkat kematangan rata-rata adalah 2,33. Pada Aspek ini, nilai indeks tertinggi adalah 4,57 dan terendah dengan mayoritas nilai 1,00. Aspek Layanan Administrasi merupakan layanan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pemerintah, sehingga pada umumnya sudah mulai banyak yang menerapkan layanan tersebut berbasis elektronik.

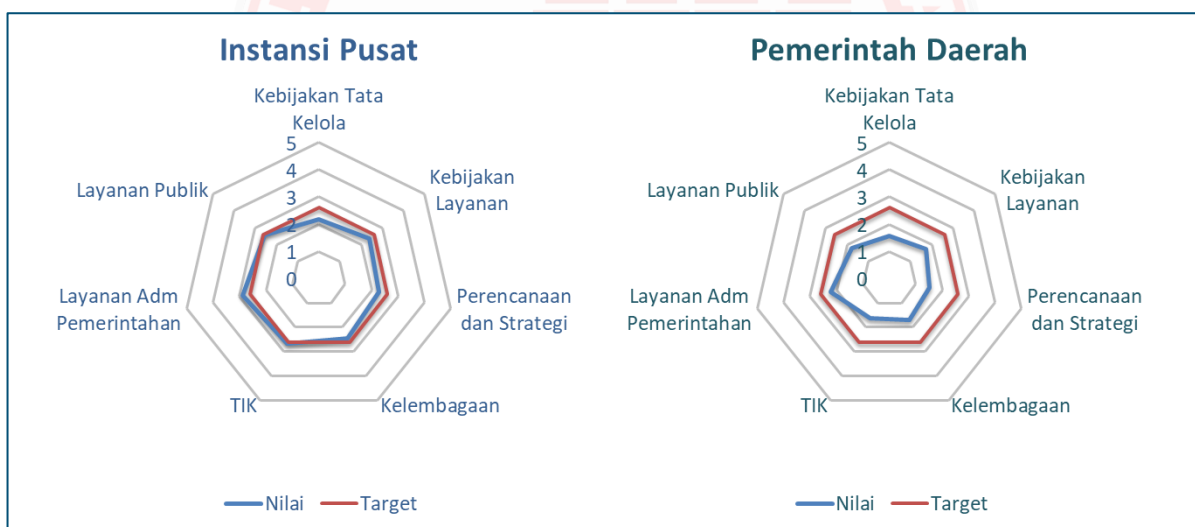


Gambar 6. Indeks Aspek SPBE 2018

Sedangkan aspek yang masih sangat rendah dengan nilai rata-rata 1,61 berada pada Aspek Perencanaan dan Strategi, dimana nilai tertinggi adalah 2,60. Hal ini menggambarkan secara umum bahwa masih banyak Instansi Pemerintah yang belum memperhatikan perencanaan dan strategi, khususnya dalam penerapan SPBE. Aspek kedua yang masih rendah adalah Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola yaitu 1,64, dengan nilai indeks tertinggi sebesar 4.43. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan SPBE, masih belum didukung dengan kebijakan internal, namun ada beberapa Instansi Pemerintah yang telah melengkapi kebijakan internal dengan sangat baik.

Secara garis besar pada ke-empat aspek lainnya memiliki kategori hampir sama yaitu pada Aspek Pelayanan Publik 1,90, dengan nilai tertinggi 5,00, dan Aspek Kebijakan Internal Layanan 1,82, dengan nilai tertinggi 4,40. Kemudian, Aspek Tata Kelola Kelembagaan memperoleh nilai rata-rata sebesar 1,80, dengan nilai tertinggi 5,00 serta terakhir pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi memperoleh nilai 1,79, dengan nilai tertinggi yaitu 5,00. Dapat disimpulkan bahwa masih banyak perbaikan serta peningkatan yang diperlukan pada setiap aspek penerapan SPBE untuk mencapai target yang diharapkan.

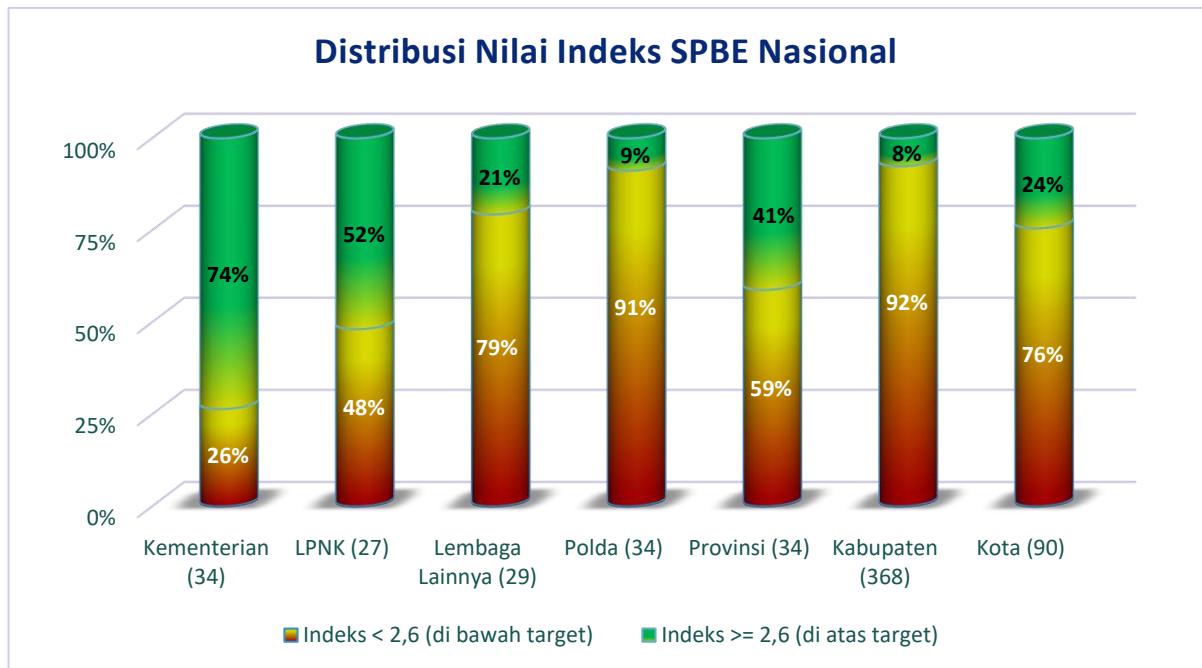
Apabila melihat perbandingan perolehan rata-rata Indeks Aspek pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah seperti yang ditunjukkan Diagram dibawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa sudah banyak Instansi Pusat yang memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penerapan SPBE. Sedangkan untuk Pemerintah Daerah, masih mengedepankan pada penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan.



Gambar 7. Indeks Aspek SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Sebagaimana perlu diketahui bahwa untuk rata-rata Indeks SPBE Instansi Pusat adalah 2,60, dimana indeks tersebut berada pada kategori “Baik”. Sedangkan, untuk rata-rata Indeks SPBE Pemerintah Daerah hanya 1,87 dengan kategori “Cukup”. Nilai Indeks SPBE tertinggi dihasilkan oleh Instansi Pusat yaitu pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan indeks 4,53 dalam kategori “Memuaskan”.

Dari hasil pengolahan data pelaksanaan evaluasi SPBE pada 616 Instansi Pemerintah tersebut, nilai rata-rata yang diperoleh sebagai Indeks SPBE Tahun 2018 adalah sebesar 1,98 dan indeks tersebut berada pada kategori “Cukup”. Namun, apabila melihat perbandingan jumlah Instansi Pemerintah yang dilakukan evaluasi SPBE, jumlah Pemerintah Daerah berkontribusi paling besar terhadap indeks tersebut seperti terlihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Distribusi Nilai Indeks SPBE

Sesuai dengan hasil tabulasi tersebut, maka secara nasional terdapat 82 (13%) Instansi Pemerintah menghasilkan Indeks SPBE yang memenuhi target dalam kategori “Baik”. Namun, masih ada 534 (87%) Instansi Pemerintah dengan Indeks SPBE dibawah 2,6.

1.2. Tabulasi Hasil Evaluasi SPBE 2018

Tabel 3. Hasil Evaluasi SPBE Kementerian

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	2.09	Cukup
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2.70	Baik
3.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2.72	Baik
4.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1.80	Cukup
5.	Kementerian Dalam Negeri	3.16	Baik
6.	Kementerian Luar Negeri	3.51	Sangat Baik
7.	Kementerian Pertahanan	2.24	Cukup
8.	Kementerian Agama	2.72	Baik
9.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.30	Baik
10.	Kementerian Keuangan	4.53	Memuaskan
11.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3.53	Sangat Baik
12.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	2.63	Baik
13.	Kementerian Kesehatan	2.13	Cukup
14.	Kementerian Sosial	3.04	Baik
15.	Kementerian Ketenagakerjaan	2.40	Cukup
16.	Kementerian Perindustrian	3.08	Baik
17.	Kementerian Perdagangan	3.45	Baik
18.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3.44	Baik
19.	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	3.85	Sangat Baik
20.	Kementerian Perhubungan	3.71	Sangat Baik
21.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	3.53	Sangat Baik
22.	Kementerian Pertanian	3.05	Baik
23.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.43	Baik
24.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.36	Baik
25.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	3.16	Baik
26.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2.23	Cukup
27.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	3.18	Baik
28.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3.25	Baik

29.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	3.07	Baik
30.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.15	Cukup
31.	Kementerian Pariwisata	3.71	Sangat Baik
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.34	Cukup
33.	Kementerian Pemuda Olahraga	1.37	Kurang
34.	Kementerian Sekretariat Negara	3.42	Baik

Tabel 4. Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Arsip Nasional Republik Indonesia	2.28	Cukup
2.	Badan Ekonomi Kreatif	2.03	Cukup
3.	Badan Informasi Geospasial	3.23	Baik
4.	Badan Kepegawaian Negara	2.72	Baik
5.	Badan Kependudukan dan KB Nasional	2.82	Baik
6.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	2.24	Cukup
7.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	2.18	Cukup
8.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2.88	Baik
9.	Badan Narkotika Nasional	1.97	Cukup
10.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2.61	Baik
11.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1.54	Kurang
12.	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	2.23	Cukup
13.	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI	3.32	Baik
14.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.44	Cukup
15.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3.95	Sangat Baik
16.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2.50	Cukup
17.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	3.31	Baik
18.	Badan Pusat Statistik	3.33	Baik
19.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	3.25	Baik
20.	Badan Siber dan Sandi Negara	2.01	Cukup
21.	Badan Standardisasi Nasional	2.27	Cukup
22.	Lembaga Administrasi Negara	3.20	Baik
23.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	3.70	Sangat Baik
24.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3.14	Baik
25.	Lembaga Ketahanan Nasional RI	2.46	Cukup
26.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	2.83	Baik
27.	Perpustakaan Nasional RI	3.19	Baik

Tabel 5. Hasil Evaluasi SPBE Alat Negara

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Badan Intelijen Negara	3.11	Baik
2.	Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia	3.26	Baik
3.	Kepolisian Daerah Aceh	1,47	Kurang
4.	Kepolisian Daerah Bengkulu	1,17	Kurang
5.	Kepolisian Daerah Jambi	2,52	Cukup
6.	Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung	1,62	Kurang
7.	Kepolisian Daerah Kepulauan Riau	1,74	Kurang
8.	Kepolisian Daerah Lampung	2,22	Cukup
9.	Kepolisian Daerah Riau	1,92	Cukup
10.	Kepolisian Daerah Sumatera Barat	2,27	Cukup
11.	Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	2,36	Cukup
12.	Kepolisian Daerah Sumatera Utara	2,30	Cukup
13.	Kepolisian Daerah Banten	1,42	Kurang
14.	Kepolisian Daerah Metro Jaya	2,90	Baik
15.	Kepolisian Daerah Jawa Barat	3,18	Baik
16.	Kepolisian Daerah Jawa Tengah	1,84	Cukup
17.	Kepolisian Daerah Jawa Timur	2,93	Baik
18.	Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	2,53	Cukup
19.	Kepolisian Daerah Kalimantan Barat	1,95	Cukup
20.	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	1,86	Cukup
21.	Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah	2,41	Cukup
22.	Kepolisian Daerah Kalimantan Timur	2,22	Cukup
23.	Kepolisian Daerah Kalimantan Utara	1,35	Kurang
24.	Kepolisian Daerah Bali	2,43	Cukup
25.	Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat	2,10	Cukup
26.	Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	2,13	Cukup
27.	Kepolisian Daerah Gorontalo	1,57	Kurang
28.	Kepolisian Daerah Sulawesi Barat	1,55	Kurang
29.	Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	1,76	Kurang
30.	Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah	1,92	Cukup
31.	Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara	1,79	Kurang
32.	Kepolisian Daerah Sulawesi Utara	1,88	Cukup
33.	Kepolisian Daerah Maluku	1,56	Kurang
34.	Kepolisian Daerah Maluku Utara	1,55	Kurang
35.	Kepolisian Daerah Papua Barat	1,20	Kurang
36.	Kepolisian Daerah Papua	1,49	Kurang

Tabel 6. Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Kabinet

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Sekretariat Kabinet	2.21	Cukup

Tabel 7. Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Jenderal Lembaga Negara

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	1.86	Cukup
2.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	1.60	Kurang
3.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	1.35	Kurang
4.	Sekretariat Mahkamah Agung RI	2.57	Cukup
5.	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	2.97	Baik
6.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2.50	Cukup
7.	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	3.57	Sangat Baik

Tabel 8. Hasil Evaluasi SPBE Lembaga Penyiaran Publik

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Radio Republik Indonesia	2.39	Cukup
2.	Televisi Republik Indonesia	1.96	Cukup

Tabel 9. Hasil Evaluasi SPBE Sekretariat Lembaga Non Struktural (LNS)

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional	1.94	Cukup
2.	Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.23	Kurang
3.	Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi	1.91	Cukup
4.	Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum	1.58	Kurang
5.	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	1.07	Kurang
6.	Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional	2.31	Cukup
7.	Sekretariat Kantor Staf Presiden	2.36	Cukup
8.	Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara	1.15	Kurang
9.	Sekretariat Komisi Informasi Pusat	1.23	Kurang
10.	Sekretariat Komisi Kejaksaan	1.23	Kurang
11.	Sekretariat Komisi Pemberantasan Korupsi	2.82	Baik
12.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia	1.21	Kurang
13.	Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	2.05	Cukup
14.	Sekretariat Komite Akreditasi Nasional	2.23	Cukup
15.	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	1.47	Kurang
16.	Sekretariat Ombudsman Republik Indonesia	1.45	Kurang
17.	Sekretariat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3.10	Baik

Tabel 10. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Aceh

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Aceh	2.26	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Aceh Barat	1.50	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	1.27	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Aceh Besar	2.16	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	1.72	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	1.26	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	1.42	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	1.63	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	1.55	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	1.47	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Aceh Timur	1.19	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Aceh Utara	1.36	Kurang
13.	Pemerintah Kab. Bener Meriah	1.38	Kurang
14.	Pemerintah Kab. Bireuen	1.37	Kurang
15.	Pemerintah Kab. Gayo Lues	1.37	Kurang
16.	Pemerintah Kab. Nagan Raya	1.64	Kurang
17.	Pemerintah Kab. Pidie	1.38	Kurang
18.	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	1.75	Kurang
19.	Pemerintah Kota Banda Aceh	2.42	Cukup
20.	Pemerintah Kota Langsa	1.34	Kurang
21.	Pemerintah Kota Lhokseumawe	1.60	Kurang
22.	Pemerintah Kota Sabang	1.43	Kurang
23.	Pemerintah Kota Subulussalam	1.90	Cukup

Tabel 11. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	3.18	Baik
2.	Pemerintah Kab. Asahan	1.15	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Batubara	1.53	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Dairi	1.42	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Deli Serdang	2.27	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	1.70	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Karo	1.70	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	1.72	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	1.93	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Langkat	2.24	Cukup
11.	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	1.70	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Nias	1.46	Kurang
13.	Pemerintah Kab. Nias Barat	1.32	Kurang
14.	Pemerintah Kab. Nias Selatan	1.17	Kurang

15.	Pemerintah Kab. Padang Lawas	1.22	Kurang
16.	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	1.15	Kurang
17.	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	3.19	Baik
18.	Pemerintah Kab. Samosir	1.46	Kurang
19.	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	2.29	Cukup
20.	Pemerintah Kab. Simalungun	1.31	Kurang
21.	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	1.81	Cukup
22.	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	1.57	Kurang
23.	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	1.34	Kurang
24.	Pemerintah Kab. Toba Samosir	1.43	Kurang
25.	Pemerintah Kota Binjai	2.49	Cukup
26.	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	1.55	Kurang
27.	Pemerintah Kota Medan	2.14	Cukup
28.	Pemerintah Kota Pematang Siantar	2.05	Cukup
29.	Pemerintah Kota Sibolga	1.40	Kurang
30.	Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.05	Cukup
31.	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	2.27	Cukup

Tabel 12. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Riau

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Riau	3.02	Baik
2.	Pemerintah Kab. Bengkalis	1.81	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	1.75	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	2.13	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Kampar	1.86	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2.00	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	1.58	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Pelalawan	1.59	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	1.64	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	1.56	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Siak	1.71	Kurang
12.	Pemerintah Kota Dumai	2.13	Cukup
13.	Pemerintah Kota Pekanbaru	1.91	Cukup

Tabel 13. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	2.65	Baik
2.	Pemerintah Kab. Agam	2.11	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	1.97	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	2.40	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	1.19	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	1.87	Cukup

7.	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	2.59	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Sijunjung	1.46	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Solok	2.02	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Solok Selatan	1.90	Cukup
11.	Pemerintah Kab. Tanah Datar	1.78	Kurang
12.	Pemerintah Kota Bukittinggi	2.09	Cukup
13.	Pemerintah Kota Padang	2.63	Baik
14.	Pemerintah Kota Padang Panjang	1.86	Cukup
15.	Pemerintah Kota Pariaman	2.61	Baik
16.	Pemerintah Kota Payakumbuh	2.29	Cukup
17.	Pemerintah Kota Sawahlunto	1.87	Cukup
18.	Pemerintah Kota Solok	2.28	Cukup

Tabel 14. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jambi

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jambi	1.79	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Batang Hari	2.22	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Bungo	1.15	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Kerinci	1.53	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Merangin	1.20	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	1.22	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Sarolangun	1.77	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	1.40	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	1.67	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Tebo	1.27	Kurang
11.	Pemerintah Kota Jambi	2.22	Cukup
12.	Pemerintah Kota Sungai Penuh	1.97	Cukup

Tabel 15. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	2.83	Baik
2.	Pemerintah Kab. Banyuasin	2.33	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Empat Lawang	1.00	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Lahat	1.15	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Muara Enim	2.57	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	2.29	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Musi Rawas	1.60	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	1.30	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	1.18	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	1.58	Kurang

11.	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	1.81	Cukup
12.	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	1.52	Kurang
13.	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.16	Kurang
14.	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	1.20	Kurang
15.	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	1.99	Cukup
16.	Pemerintah Kota Pagar Alam	1.22	Kurang
17.	Pemerintah Kota Palembang	1.90	Cukup
18.	Pemerintah Kota Prabumulih	1.57	Kurang

Tabel 16. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bengkulu

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Bengkulu	1.76	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	1.47	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	1.42	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	1.17	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Kaur	1.00	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Kepahiang	1.15	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Mukomuko	1.54	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	1.66	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Seluma	1.00	Kurang
10.	Pemerintah Kota Bengkulu	1.74	Kurang

Tabel 17. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
11.	Pemerintah Provinsi Lampung	1.29	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Lampung Barat	2.45	Cukup
13.	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	1.48	Kurang
14.	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	1.15	Kurang
15.	Pemerintah Kab. Lampung Timur	1.26	Kurang
16.	Pemerintah Kab. Lampung Utara	1.36	Kurang
17.	Pemerintah Kab. Mesuji	1.30	Kurang
18.	Pemerintah Kab. Pesawaran	1.40	Kurang
19.	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	1.56	Kurang
20.	Pemerintah Kab. Pringsewu	2.29	Cukup
21.	Pemerintah Kab. Tanggamus	1.37	Kurang
22.	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	1.56	Kurang
23.	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	1.68	Kurang
24.	Pemerintah Kab. Way Kanan	1.99	Cukup
25.	Pemerintah Kota Bandar Lampung	1.26	Kurang
26.	Pemerintah Kota Metro	2.33	Cukup

Tabel 18. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kepulauan Riau

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2.14	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Bintan	2.04	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Karimun	1.70	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	2.50	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Lingga	1.36	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Natuna	2.43	Cukup
7.	Pemerintah Kota Batam	2.26	Cukup
8.	Pemerintah Kota Tanjungpinang	2.06	Cukup

Tabel 19. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kep. Bangka Belitung

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	3.05	Baik
2.	Pemerintah Kab. Bangka	2.33	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Bangka Barat	2.31	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	1.65	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	1.94	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Belitung	1.69	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Belitung Timur	2.08	Cukup
8.	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	1.35	Kurang

Tabel 20. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Banten

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Banten	2.01	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Lebak	2.94	Baik
3.	Pemerintah Kab. Pandeglang	3.26	Baik
4.	Pemerintah Kab. Serang	2.33	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Tangerang	3.08	Baik
6.	Pemerintah Kota Cilegon	3.23	Baik
7.	Pemerintah Kota Serang	2.41	Cukup
8.	Pemerintah Kota Tangerang	3.16	Baik
9.	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3.29	Baik

Tabel 21. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di DKI Jakarta

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	3.19	Baik

Tabel 22. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Barat

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3.21	Baik
2.	Pemerintah Kab. Bandung	2.72	Baik
3.	Pemerintah Kab. Bandung Barat	2.54	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Bekasi	2.27	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Bogor	2.58	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Ciamis	1.44	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Cianjur	2.19	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Cirebon	2.63	Baik
9.	Pemerintah Kab. Garut	2.04	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Indramayu	1.65	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Karawang	2.22	Cukup
12.	Pemerintah Kab. Kuningan	2.25	Cukup
13.	Pemerintah Kab. Majalengka	2.30	Cukup
14.	Pemerintah Kab. Pangandaran	1.50	Kurang
15.	Pemerintah Kab. Purwakarta	3.00	Baik
16.	Pemerintah Kab. Subang	2.03	Cukup
17.	Pemerintah Kab. Sukabumi	2.54	Cukup
18.	Pemerintah Kab. Sumedang	2.46	Cukup
19.	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	1.42	Kurang
20.	Pemerintah Kota Bandung	3.11	Baik
21.	Pemerintah Kota Bekasi	2.43	Cukup
22.	Pemerintah Kota Bogor	2.91	Baik
23.	Pemerintah Kota Cimahi	3.07	Baik
24.	Pemerintah Kota Cirebon	2.26	Cukup
25.	Pemerintah Kota Depok	2.62	Baik
26.	Pemerintah Kota Sukabumi	2.33	Cukup
27.	Pemerintah Kota Tasikmalaya	2.16	Cukup

Tabel 23. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	3.67	Sangat Baik
2.	Pemerintah Kab. Banjarnegara	1.74	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Banyumas	2.63	Baik

4.	Pemerintah Kab. Batang	3.39	Baik
5.	Pemerintah Kab. Blora	2.07	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Boyolali	2.72	Baik
7.	Pemerintah Kab. Brebes	1.39	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Cilacap	2.14	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Demak	2.96	Baik
10.	Pemerintah Kab. Grobogan	2.11	Cukup
11.	Pemerintah Kab. Jepara	2.64	Baik
12.	Pemerintah Kab. Karanganyar	2.04	Cukup
13.	Pemerintah Kab. Kebumen	2.11	Cukup
14.	Pemerintah Kab. Kendal	2.94	Baik
15.	Pemerintah Kab. Klaten	2.23	Cukup
16.	Pemerintah Kab. Kudus	2.72	Baik
17.	Pemerintah Kab. Magelang	2.18	Cukup
18.	Pemerintah Kab. Pati	2.27	Cukup
19.	Pemerintah Kab. Pekalongan	1.49	Kurang
20.	Pemerintah Kab. Pemalang	3.11	Baik
21.	Pemerintah Kab. Purbalingga	1.94	Cukup
22.	Pemerintah Kab. Purworejo	2.04	Cukup
23.	Pemerintah Kab. Rembang	2.35	Cukup
24.	Pemerintah Kab. Semarang	2.66	Baik
25.	Pemerintah Kab. Sragen	2.75	Baik
26.	Pemerintah Kab. Sukoharjo	2.77	Baik
27.	Pemerintah Kab. Tegal	2.58	Cukup
28.	Pemerintah Kab. Temanggung	1.77	Kurang
29.	Pemerintah Kab. Wonogiri	1.97	Cukup
30.	Pemerintah Kab. Wonosobo	2.94	Baik
31.	Pemerintah Kota Magelang	2.34	Cukup
32.	Pemerintah Kota Pekalongan	2.95	Baik
33.	Pemerintah Kota Salatiga	1.66	Kurang
34.	Pemerintah Kota Semarang	3.27	Baik
35.	Pemerintah Kota Surakarta	2.53	Cukup
36.	Pemerintah Kota Tegal	2.33	Cukup

Tabel 24. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	2.92	Baik
2.	Pemerintah Kab. Bangkalan	1.99	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Banyuwangi	3.43	Baik
4.	Pemerintah Kab. Blitar	2.14	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Bojonegoro	2.52	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Bondowoso	1.86	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Gresik	2.56	Cukup

8.	Pemerintah Kab. Jember	1.80	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Jombang	1.43	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Kediri	1.56	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Lamongan	3.11	Baik
12.	Pemerintah Kab. Lumajang	1.99	Cukup
13.	Pemerintah Kab. Madiun	2.10	Cukup
14.	Pemerintah Kab. Magetan	1.82	Cukup
15.	Pemerintah Kab. Malang	1.94	Cukup
16.	Pemerintah Kab. Mojokerto	1.74	Kurang
17.	Pemerintah Kab. Nganjuk	2.16	Cukup
18.	Pemerintah Kab. Ngawi	2.16	Cukup
19.	Pemerintah Kab. Pacitan	1.56	Kurang
20.	Pemerintah Kab. Pamekasan	2.31	Cukup
21.	Pemerintah Kab. Pasuruan	2.42	Cukup
22.	Pemerintah Kab. Ponorogo	1.66	Kurang
23.	Pemerintah Kab. Probolinggo	2.15	Cukup
24.	Pemerintah Kab. Sampang	1.38	Kurang
25.	Pemerintah Kab. Sidoarjo	2.55	Cukup
26.	Pemerintah Kab. Situbondo	3.24	Baik
27.	Pemerintah Kab. Sumenep	1.88	Cukup
28.	Pemerintah Kab. Trenggalek	1.76	Kurang
29.	Pemerintah Kab. Tuban	2.36	Cukup
30.	Pemerintah Kab. Tulungagung	2.46	Cukup
31.	Pemerintah Kota Batu	2.43	Cukup
32.	Pemerintah Kota Blitar	1.52	Kurang
33.	Pemerintah Kota Kediri	2.84	Baik
34.	Pemerintah Kota Madiun	3.16	Baik
35.	Pemerintah Kota Malang	2.44	Cukup
36.	Pemerintah Kota Mojokerto	1.94	Cukup
37.	Pemerintah Kota Pasuruan	2.38	Cukup
38.	Pemerintah Kota Probolinggo	2.53	Cukup
39.	Pemerintah Kota Surabaya	3.61	Sangat Baik

Tabel 25. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Yogyakarta

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah D.I. Yogyakarta	3.33	Baik
2.	Pemerintah Kab. Bantul	1.84	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2.73	Baik
4.	Pemerintah Kab. Kulon Progo	2.69	Baik
5.	Pemerintah Kab. Sleman	3.13	Baik
6.	Pemerintah Kota Yogyakarta	2.96	Baik

Tabel 26. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	2.65	Baik
2.	Pemerintah Kab. Bengkayang	1.75	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	1.93	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Kayong Utara	1.48	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Ketapang	1.50	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Kubu Raya	1.82	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Landak	1.15	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Melawi	1.15	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Mempawah	1.46	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Sambas	1.64	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Sanggau	1.54	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Sekadau	1.40	Kurang
13.	Pemerintah Kab. Sintang	1.56	Kurang
14.	Pemerintah Kota Pontianak	2.33	Cukup
15.	Pemerintah Kota Singkawang	1.74	Kurang

Tabel 27. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2.76	Baik
2.	Pemerintah Kab. Barito Selatan	2.65	Baik
3.	Pemerintah Kab. Barito Timur	1.58	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Barito Utara	1.81	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Gunung Mas	2.29	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Kapuas	2.17	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Katingan	1.85	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2.47	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	1.83	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Lamandau	1.58	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Murung Raya	1.50	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	2.10	Cukup
13.	Pemerintah Kab. Seruyan	1.74	Kurang
14.	Pemerintah Kab. Sukamara	1.83	Cukup
15.	Pemerintah Kota Palangka Raya	1.74	Kurang

Tabel 28. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2.49	Cukup

2.	Pemerintah Kab. Berau	1.30	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Kutai Barat	1.21	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	1.82	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Kutai Timur	1.00	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1.40	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Paser	1.85	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	1.20	Kurang
9.	Pemerintah Kota Balikpapan	2.77	Baik
10.	Pemerintah Kota Bontang	2.72	Baik
11.	Pemerintah Kota Samarinda	2.64	Baik

Tabel 29. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	3.05	Baik
2.	Pemerintah Kab. Balangan	1.98	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Banjar	1.94	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Barito Kuala	1.99	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	2.02	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	1.95	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	1.46	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Kotabaru	1.86	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Tabalong	1.92	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	1.73	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Tanah Laut	1.42	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Tapin	2.07	Cukup
13.	Pemerintah Kota Banjarbaru	1.88	Cukup
14.	Pemerintah Kota Banjarmasin	1.93	Cukup

Tabel 30. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	1.55	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Bulungan	1.57	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Tana Tidung	1.15	Kurang
4.	Pemerintah Kota Tarakan	1.32	Kurang

Tabel 31. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Bali

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Bali	1.62	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Badung	2.56	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Bangli	2.33	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Buleleng	2.99	Baik
5.	Pemerintah Kab. Gianyar	1.76	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Jembrana	2.77	Baik
7.	Pemerintah Kab. Karangasem	1.74	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Klungkung	2.10	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Tabanan	1.23	Kurang
10.	Pemerintah Kota Denpasar	2.64	Baik

Tabel 32. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi NTB	2.95	Baik
2.	Pemerintah Kab. Dompu	1.45	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Lombok Barat	2.55	Cukup
4.	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	2.15	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Lombok Timur	1.36	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Lombok Utara	1.33	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Sumbawa	1.80	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	1.99	Cukup
9.	Pemerintah Kota Mataram	2.71	Baik

Tabel 33. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi NTT	1.26	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Alor	1.89	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Belu	1.46	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Ende	1.81	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Flores Timur	1.04	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Kupang	1.23	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Malaka	1.18	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Manggarai	1.82	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	1.72	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	1.72	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Nagekeo	1.76	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Ngada	1.27	Kurang

13.	Pemerintah Kab. Rote Ndao	1.33	Kurang
14.	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	1.00	Kurang
15.	Pemerintah Kab. Sikka	1.30	Kurang
16.	Pemerintah Kab. Sumba Barat	1.53	Kurang
17.	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	1.11	Kurang
18.	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	1.30	Kurang
19.	Pemerintah Kab. Sumba Timur	1.16	Kurang
20.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	1.53	Kurang
21.	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	1.40	Kurang
22.	Pemerintah Kota Kupang	1.64	Kurang

Tabel 34. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	1.78	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	2.00	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.32	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	1.46	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	1.30	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	1.19	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	1.25	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	1.65	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	1.38	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	1.40	Kurang
11.	Pemerintah Kota Bitung	1.00	Kurang
12.	Pemerintah Kota Kota Mobagu	1.13	Kurang
13.	Pemerintah Kota Manado	2.53	Cukup
14.	Pemerintah Kota Tomohon	1.04	Kurang

Tabel 35. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Gorontalo

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Gorontalo	1.48	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Bone Bolango	1.87	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Gorontalo	1.39	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	1.21	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Pohuwato	1.34	Kurang
6.	Pemerintah Kota Gorontalo	2.11	Cukup

Tabel 36. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Barat

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	1.46	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Majene	1.00	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Mamasa	1.27	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Mamuju	1.49	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	1.40	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Pasangkayu	1.32	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	2.51	Cukup

Tabel 37. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	2.24	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Banggai	1.48	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	1.31	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Morowali Utara	1.47	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	1.95	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Sigi	2.11	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	1.34	Kurang
8.	Pemerintah Kota Palu	1.66	Kurang

Tabel 38. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	2.08	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Bantaeng	1.76	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Barru	1.24	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Bone	1.50	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Bulukumba	2.09	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Enrekang	1.56	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Gowa	1.72	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Jeneponto	1.42	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	1.54	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Luwu	1.29	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Luwu Timur	1.89	Cukup
12.	Pemerintah Kab. Luwu Utara	2.12	Cukup
13.	Pemerintah Kab. Maros	1.92	Cukup
14.	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1.34	Kurang
15.	Pemerintah Kab. Pinrang	2.47	Cukup
16.	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	1.32	Kurang

17.	Pemerintah Kab. Sinjai	1.43	Kurang
18.	Pemerintah Kab. Soppeng	1.66	Kurang
19.	Pemerintah Kab. Takalar	1.70	Kurang
20.	Pemerintah Kab. Tana Toraja	1.58	Kurang
21.	Pemerintah Kab. Toraja Utara	1.45	Kurang
22.	Pemerintah Kab. Wajo	1.41	Kurang
23.	Pemerintah Kota Makassar	2.60	Baik
24.	Pemerintah Kota Palopo	1.88	Cukup
25.	Pemerintah Kota Parepare	2.13	Cukup

Tabel 39. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	1.51	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Bombana	1.67	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Buton	1.63	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Buton Selatan	1.07	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Buton Tengah	1.19	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Buton Utara	2.20	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Kolaka	1.79	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	1.41	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	1.27	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Konawe	1.70	Kurang
11.	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	1.39	Kurang
12.	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	1.75	Kurang
13.	Pemerintah Kab. Konawe Utara	1.31	Kurang
14.	Pemerintah Kab. Muna	1.77	Kurang
15.	Pemerintah Kab. Muna Barat	1.24	Kurang
16.	Pemerintah Kab. Wakatobi	1.66	Kurang
17.	Pemerintah Kota Baubau	1.59	Kurang
18.	Pemerintah Kota Kendari	2.22	Cukup

Tabel 40. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Maluku	1.38	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	1.33	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	1.54	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	1.56	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	1.33	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat	1.68	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	1.10	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	1.33	Kurang

9.	Pemerintah Kota Ambon	2.93	Baik
10.	Pemerintah Kota Tual	1.62	Kurang

Tabel 41. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Maluku Utara

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	1.00	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	1.91	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	1.00	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	1.70	Kurang
5.	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	1.00	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	1.48	Kurang
7.	Pemerintah Kota Ternate	1.38	Kurang
8.	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	1.64	Kurang

Tabel 42. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua Barat

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Papua Barat	1.18	Kurang
2.	Pemerintah Kab. Fak-Fak	1.00	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Kaimana	1.37	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Manokwari	1.91	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	1.28	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Raja Ampat	1.00	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Sorong	1.80	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni	1.38	Kurang
9.	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	1.05	Kurang
10.	Pemerintah Kota Sorong	1.41	Kurang

Tabel 43. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Papua

No.	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Papua	2.24	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Biak Numfor	1.37	Kurang
3.	Pemerintah Kab. Boven Digoel	1.73	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Jayapura	2.03	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Keerom	1.01	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Mappi	1.00	Kurang
7.	Pemerintah Kab. Mimika	1.25	Kurang
8.	Pemerintah Kab. Nabire	1.69	Kurang

9.	Pemerintah Kab. Sarmi	1.00	Kurang
10.	Pemerintah Kab. Supiori	1.02	Kurang
11.	Pemerintah Kota Jayapura	1.41	Kurang



PENUTUP





Penutup

4.1. Permasalahan Umum

Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan pada tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing Domain, tantangan permasalahan dalam penerapan SPBE secara umum, antara lain:

a) Kebijakan

Adanya ego sektoral pada masing-masing Instansi Pemerintah dalam penerapan SPBE yang terintegrasi dan terpadu karena kurang di dukung dengan adanya kebijakan, sehingga pengembangannya belum optimal dan sangat sulit bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan transformasi penerapan SPBE.

b) Tata Kelola

Permasalahan tersebut meliputi antara lain belum selarasnya perencanaan penganggaran yang disesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan, perlu adanya sinkronisasi antara kebutuhan dengan program yang telah ada, serta kepatuhan terhadap kebijakan, sehingga pemanfaatan anggaran khususnya untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak efisien. Disisi lain, penyebaran anggaran pengelolaan TIK masih belum seimbang antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan banyak terjadi duplikasi pengadaan karena tidak direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik.

c) Layanan

Pada umumnya sudah banyak Instansi Pemerintah yang menerapkan Layanan berbasis elektronik. Namun dari hasil evaluasi, pengembangan SPBE yang dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan tetapi kepentingan. Pembangunan sistem aplikasi untuk kepentingan tertentu menyebabkan layanan tidak terintegrasi dan pemanfaatannya tidak berkesinambungan. Selain itu, pengembangan sistem aplikasi belum berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan sehingga tingkat kemudahan dalam pemanfaatan layanan tersebut masih rendah.

4.2. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan Indeks SPBE secara nasional dan menunjang penerapan SPBE yang terintegrasi, terpadu dan berkesinambungan diperlukan kerja sama berbagai pihak, dalam hal ini baik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mendorong beberapa peningkatan aspek-aspek SPBE berikut:

- a) Komitmen pimpinan untuk memberikan arah kebijakan dalam menghadapi isu strategis, memotivasi para pejabat dan pegawai dalam mendukung penerapan SPBE dapat diwujudkan dengan adanya Tim Koordinasi SPBE (Tim Pengarah SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b) Penguatan kebijakan tata kelola dan layanan SPBE sebagai pedoman dalam pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c) Perlu adanya penyelarasan tata kelola SPBE, dalam hal ini strategi perencanaan penerapan SPBE dan anggaran belanja SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan SPBE antar Instansi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) Optimalisasi penerapan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi dan berdaya guna, ditunjang dengan peningkatan kapasitas SDM SPBE, baik dalam bentuk pembinaan atau sosialisasi terhadap penerapan SPBE.

4.3. Tindak Lanjut Tahun 2019

Sesuai dengan program rencana kerja evaluasi SPBE, pada tahun 2019 Kementerian PANRB akan melakukan asistensi dan pemantauan penerapan SPBE pada masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan penerapan dan Indeks SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyampaikan hasil evaluasi mandiri tahun 2019 kepada Kementerian PANRB sebagai hasil pemantauan, kemudian pada tahun 2020 akan dilakukan evaluasi SPBE secara menyeluruh melalui tahapan evaluasi eksternal.

Selain itu, Kementerian PANRB akan melakukan evaluasi SPBE terhadap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum dievaluasi pada tahun 2018. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan data evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah secara menyeluruh.



